

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Indonesia-Tiongkok telah terjalin sejak masa kepemimpinan Soekarno hingga masa pemerintahan Jokowi. Era Soekarno menjadi tonggak penting hubungan persahabatan Indonesia-Tiongkok. Liu Hong, dalam *China and the Shaping of Indonesia, 1949-1965*, mengungkapkan pada masa itu Tiongkok bagaikan mercusuar, memberikan petunjuk untuk Indonesia agar mengetahui kemana dan bagaimana Indonesia harus dibangun.<sup>1</sup> Indonesia dan Tiongkok pun sepakat untuk mempererat hubungan yang telah berjalan baik saat itu, ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan serta persetujuan kebudayaan pada tanggal 1 April 1961.

Perkembangan zaman yang membuat Indonesia dan Tiongkok mengalami berbagai macam kerjasama baik dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial dan kebudayaan, antara kedua negara ini sangat berkaitan erat. Maka dalam hal ini Indonesia dengan Tiongkok pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia kembali membuat sebuah *Rencana Aksi Implementasi Deklarasi Bersama Mengenai Kemitraan Strategis Antara Pemerintah Republik Inonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China*. Dimana Strategic Partnership Agreement (SPA) antara Indonesia dengan Tiongkok disepakati pada tahun 2005.

---

<sup>1</sup> Rini Utami, *Hubungan Indonesia Tiongkok: dari Soekarno hingga Jokowi*, diakses dalam <http://www.antaraneews.com/berita/490460/hubungan-indonesia-tiongkok-dari-soekarno-hingga-jokowi> (22/1/2017, 0:31 WIB)

Membahas mengenai hubungan antara kedua negara baik dalam sosial dan budaya serta ekonomi dan pendidikan.

Pada tanggal 25 April 2005 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Republik Rakyat China Hu Jintao, telah menandatangani mengenai kemitraan strategis antara Indonesia dan Republik Rakyat China. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan bagi kedua negara dan rakyatnya melalui peningkatan dan perluasan kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi serta sosial budaya.<sup>2</sup> Adanya hubungan Indonesia-Tiongkok ini tentunya juga menjadi peranan yang penting bagi salah satu aktor non-state di Indonesia salah satunya yakni Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Jawa Timur (PITI JATIM).

PITI merupakan organisasi dakwah sosial keagamaan yang berskala nasional berfungsi sebagai tempat singgah, dan untuk silaturahmi belajar ilmu agama dan cara beribadah bagi etnis Tionghoa.<sup>3</sup> Program dari adanya PITI yakni menyampaikan mengenai dakwah Islam khususnya kepada masyarakat keturunan Tionghoa dan pembinaan dalam bentuk bimbingan kepada Muslim Tionghoa dalam menjalankan syariat Islam baik di lingkungan keluarganya yang bukan non muslim dan sebagai bekal persiapan untuk berbaur dengan umat Islam di lingkungan tempat tinggal.

---

<sup>2</sup> Kementerian Luar Negeri, *Rencana Aksi Implementasi Deklarasi Bersama Mengenai Kemitraan Strategis Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China*, diakses dalam <http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index> (22/1/2017, 1:16 WIB)

<sup>3</sup> Mahyudi, Strategi Dakwah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Periode 2005-2010 dalam Meningkatkan Ibadah Anggota, diakses dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7375/1/MAHYUDI-FDK.pdf> (31/3/2016, 19:15 WIB)

Hal ini menarik ketika PITI JATIM dapat menjadi peran penting dalam hubungan Indonesia-Tiongkok, terlebih setelah adanya *Strategic Partnership Agreement* pada tahun 2005, pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Maka hubungan Indonesia dengan Tiongkok tidak terlepas pula dari peran sebagai organisasi Muslim Tionghoa yang ada di Indonesia. *Strategic Partnership Agreement* sangat dibutuhkan untuk menjalin kerjasama antara kedua negara Indonesia dan Tiongkok. Dalam hal ini pula Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim, sehingga PITI JATIM sebagai wadah bagi muslim Tionghoa untuk mempelajari lebih dalam mengenai agama, erat kaitannya dengan hubungan Indonesia-Tiongkok setelah terjalin *Strategic Partnership Agreement*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimanakah Dampak Sosial dan Budaya pada Strategic Partnership Agreement (SPA) Indonesia-Tiongkok terhadap PITI JATIM?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berangkat dari sebuah kajian kebijakan dan rumusan masalah, penulis memiliki tujuan dan manfaat yang menjadi acuan dasar dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan mengenai penandatanganan perjanjian *Strategic Partnership Agreement* Indonesia-Tiongkok.
- b. Menjelaskan sejarah tentang Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Jawa Timur (PITI JATIM).
- c. Menjelaskan dampak sosial dan budaya yang dirasakan oleh Persatuan Islam Tionghoa Jawa Timur (PITI JATIM) dengan adanya SPA Indonesia-Tiongkok.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dan memberikan informasi pengetahuan secara lebih jauh tentang dampak penandatanganan perjanjian *Strategic Partnership Agreement* Indonesia-Tiongkok terhadap Komunitas Tionghoa: PITI JATIM.

#### **b. Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan mengenai dampak sosial dan budaya yang dirasakan oleh PITI JATIM dengan adanya *Strategic Partnership Agreement* (SPA) bagi Hubungan Indonesia-Tiongkok, bagi mahasiswa/i jurusan Hubungan Internasional khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang.

#### 1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti pada fokus hubungan antar *state-state* maupun antar *aktor non-state dengan state*.

Penelitian pertama dari tesis **Johan Wahyudi (2010)** yang berjudul **“Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Semarang 1986-2007”** memaparkan bahwa Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau yang disingkat dengan PITI. Sebuah wadah atau organisasi yang berperan aktif untuk memberikan ruang bagi muslim Tionghoa yang bertempat tinggal di Indonesia untuk mampu menjaga hubungan baik dengan muslim pribumi. Terdapat tokoh muslim Tionghoa yang tergabung dalam pembentukan PITI yaitu Haji Yap Siong yang berasal dari Moyan, China. Ia menjadi muslim pada tahun 1931 dan mendirikan organisasi dakwah dalam hal agama islam yang diberikan nama Persatuan Islam Indonesia (PIT) di kota Deli Serdang, Sumatra Utara ia mencoba melakukan dakwah dimulai dari Sumatra Utara ke Sumatra Selatan hingga menyebrang menuju Jawa Barat sampai Jawa Timur. Ketika berdakwah Yap Siong mendapatkan izin dari kolonial Belanda untuk melakukan dakwah.<sup>4</sup>

Pada tahun 1960-1970 an setelah meletusnya pemberontakan Gerakan 30 September 1965 (G30S PKI). Pada saat itu pemerintah mencoba membuat sebuah inovasi terbaru yaitu menggalakan gerakan pembinaan dan persatuan bangsa (*nation and character building*), maka simbol-simbol dianggap sebagai

---

<sup>4</sup> Johan Wahyudi, *Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Semarang 1986ju-2007*, Skripsi. Yogyakarta: Sejarah dan Kebudayaan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hal. 2.

penghambat pembaruan oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1972, Menteri Agama H.A Mukti Ali dalam suratnya No. MA/244/1972 menjelaskan bahwa agama islam merupakan agama universal dan menganggap PITI tidak selayaknya ada tidak ada perbedaan antara muslim Tionghoa dengan pribumi.<sup>5</sup> Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat bagi etnis Tionghoa, saat mengadakan rapat menyeluruh hasil yang disepakati yakni tetap menggunakan istilah Pembina Iman Tauhid Islam dan juga Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Hal itu disebabkan karena penamaan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia telah diberikan sejak berdirinya organisasi tersebut.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Johan Wahyudi memiliki kesamaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), namun perbedaan yang terjadi adalah Johan Wahyudi membahas mengenai PITI Semarang pada tahun 1986-2007 dimana proses islamisasi yang dilakukan oleh PITI Semarang terhadap masyarakat Tionghoa.

Kemudian pada prosesnya peneliti terdahulu mencoba mencari hasil mengenai islamisasi yang dilakukan oleh PITI Semarang terhadap para non-muslim yang berasal dari etnis Tionghoa. Perbedaan yang terdapat pula antara penelitian terdahulu dengan penulis yakni penelitian terdahulu tidak menjelaskan hubungan antara sebuah negara dengan negara lain, hanya berfokus kepada PITI Semarang yang menjadi wadah untuk mengislamisasikan non-muslim keturunan Tionghok.

---

<sup>5</sup> Ibid, Johan Wahyudi.

Jika penulis saat ini mencoba untuk mencari hubungan antara dua negara yakni Indonesia dan Tiongkok dalam studi kasus PITI JATIM.

Penelitian kedua merupakan tesis dari *Nia Paramita Tendeau (2010)* yang berjudul *“Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Sebagai Salah Satu Wadah Asimiliasi Etnis Tionghoa di Indonesia 1972-1987”* memaparkan bahwa pada dasarnya proses asimiliasi etnis Tionghoa di Indonesia telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan diberlakukannya perjanjian Dwi Kewarganegaraan yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat Cina pada tahun 1955 namun disahkannya perjanjian ini pada tahun 1960, dimana penelitian terdahulu ini pula bertujuan untuk mengetahui perkembangan Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) dari tahun 1972-1987. Kebijakan Pemerintah pada era Soeharto terhadap etnis Tionghoa.<sup>6</sup>

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh Nia Paramita tidak menjelaskan adanya hubungan yang dilakukan oleh dua negara, berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti yakni mencoba meneliti mengenai hubungan yang dilakukan oleh dua negara : Indonesia-Tiongkok. Kemudian melihat dari adanya keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terdapat kesamaan dalam hal objektivitas penelitian yang dilakukan, melakukan penelitian pada studi kasus PITI namun tidak sama tinjauan lokasi yang diteliti.

---

<sup>6</sup> Nia Paramita Tandeau, 2010, *Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Sebagai Salah Satu Wadah Asimiliasi Etnis Tionghoa di Indonesia 1972-1987*, Skripsi. Jakarta: Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia, hal.10.

Penelitian ketiga merupakan tesis dari *Michella Desri Viollita (2013)* yang berjudul ***“Dampak Peningkatan Ekonomi Indonesia Melalui Deklarasi Kemitraan Strategis Dengan Cina Tahun 2005-2011”*** memaparkan bahwasannya Pada masa deklarasi kemitraan periode pertama hingga memasuki tahap akhir, kedua negara sepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke babak berikutnya yakni, dengan lebih memperluas bidang kerjasama yang akan dikerjakan oleh masing-masing pihak. Didalam kesepakatan pada periode selanjutnya tersebut, terdapat konsep baru yang muncul. Jika sebelumnya diperiode 2005-2010 hanya terdapat kesepakatan untuk bekerjasama di bidang Pertumbuhan ekonomi, Keamanan-Politik, serta Sosial-Budaya, namun di DKS untuk tahun 2010-2015 ini munculah konsep *Plan of Action* yang membahas untuk melanjutkan kerjasama pada Peningkatan-Pengembangan-Ekonomi, Pertahanan-Keamanan-Politik, Sosial-Budaya, serta Pertanian-Maritim dan Pengetahuan dalam Ilmu Teknologi.<sup>7</sup>

Penelitian keempat merupakan tesis dari *Sutan Ahmad Riyadh (2009)* berjudul ***“Hubungan Bilateral Kebudayaan Indonesia dan Malaysia (Studi Kasus: Interaksi Budaya Sumatera Barat dan Negeri Sembilan)”*** memaparkan bahwa Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia sudah terjalin lama, baik ketika kedua negara itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan yang banyak di Nusantara maupun setelah terbentuknya kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Hubungan tersebut didukung oleh hubungan antar daerah atau negeri pada masing-masing negara. Salah satu daerah yang memiliki hubungan sangat erat dengan

---

<sup>7</sup> Michella Desri Viollita, 2013, *Dampak Peningkatan Ekonomi Indonesia Melalui Deklarasi Kemitraan Strategis dengan Cina Tahun 2005-2011*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hal. 60.



Malaysia yakni Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia pendukung kebudayaan Minangkabau dan Negeri Sembilan salah satu kerajaan dalam negara Malaysia pendukung kebudayaan Melayu-Minangkabau.

Hubungan antara Sumatera Barat dan Negeri Sembilan terdiri dari hubungan sejarah, keturunan, sosial ekonomi, politik dan kebudayaan. Hubungan ini tentunya memberikan pengaruh sangat besar terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia. Mobilitas yang terjadi antara kedua negara Indonesia dan Malaysia dikarenakan adanya interaksi budaya Sumatera Barat dan Negeri Sembilan, baik kunjungan formal dan informal telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin setempat.<sup>8</sup>

Penelitian kelima merupakan skripsi dari **Dwi Ana Wiyatiningrum (2015)** berjudul **“Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pada Masa Perdana Menteri Kevin Rudd (2007-2013)”** memaparkan bahwa Indonesia dan Australia adalah dua negara dalam dua benua yang berbeda, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia sendiri merupakan bagian dari Benua Asia yang terdiri dari berbagai pulau dan membentuk sebuah negara dengan jumlah penduduk ratusan juta orang. Hubungan antara Indonesia dan Australia dapat dikatakan sebagai hubungan bilateral yang unik dikatakan demikian karena dalam menjalin kehidupan bertetangga terdapat dua sisi yang berbeda diantara keduanya, dalam satu sisi kerjasama yang kuat dapat memperat hubungan diantara kedua negara.

---

<sup>8</sup> Sutan Ahmad Riyadh, 2009, *Hubungan Bilateral Kebudayaan Indonesia dan Malaysia (Studi Kasus: Interaksi Budaya Sumatera Barat dan Negeri Sembilan)*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 13.

Dalam hal ini maka Kevin Rudd selaku Perdana Menteri Australia yang membawa hubungan Indonesia dan Australia lebih harmonis. Karena bagi Rudd dengan membuka kerjasama dengan Indonesia maka akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan politik terutama di wilayah ASEAN. Kerjasama yang dilakukan baik antara Indonesia-Australia dalam <sup>9</sup>bidang lingkungan, bidang pertahanan dan keamanan, bidang politik dan bidang pendidikan.

**Tabel 1.1 : Posisi Penelitian**

No.	Nama dan Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1.	Skripsi : <b>Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Semarang 1986-2007</b>  Oleh : Johan Wahyudi	Metode : - Deskriptif  Teori /konsep : - Sosio-Historis - Fungsionalisme Struktural	- PITI Semarang merupakan sebuah organisasi lama yang telah berdiri dan cukup tua yakni sejak 1964 di Semarang. - Dalam mengislamkan etnis Tionghoa PITI Semarang melakukan 3 hal yakni pendekatan awal, proses pengislaman, pembinaan setelah masuk islam.
2.	Skripsi : <b>Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Sebagai Salah Satu Wadah Asimiliasi Etnis</b>	Metode : Deskriptif-Kualitatif  Teori/Konsep :	- Pada masa Presiden Soeharto, dikeluarkan kebijakan yang pertama yakni perubahan nama bagi etnis Tionghoa. Kebijakan yang

<sup>9</sup> Dwi Ana Wiyatiningrum, 2015, *Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pada Masa Perdana Menteri Kevin Rudd (2007-2013)*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta, hal.68.

No.	Nama dan Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
	<b>Tionghoa di Indonesia 1972-1987</b>  Oleh : Nia Paramitha Tendea	- Konsep Histiografi	dikeluarkan sesuai dengan Presidium kabinnet No. 127/U/KEP/12/1966. - Asmilasi diusung oleh orang-orang yang merupakan mantan pendiri Baperki dan golongan muda Tionghoa yang merasa khawatir dengan sikap etnis Tionghoa Indonesia, yang bersifat eksklusif.
3.	Skripsi : <b>Dampak Peningkatan Ekonomi Indonesia Melalui Deklarasi Kemitraan Strategis Dengan Cina Tahun 2005-2011</b>  Oleh : Michella Desri Viollita	Metode : Kualitatif Teori/Konsep : - Kepentingan Nasional - Liberalisme : Ekonomi Politik Internasional	- Kerjasama Indonesia-Cina menjadi faktor penting dalam peningkatan perekonomian dalam negeri, yakni : Pertama, pola multilateral yang sudah berkembang di dunia Internasional untuk penanganan masalah dalam negeri. Kedua, interpedensi antar sesama negara. Pola integrasi yang dapat mempengaruhi struktur perekonomian, politik, sosial, dan pertahanan yang ada pada suatu negara. - Indonesia menginginkan adanya peningkatan

No.	Nama dan Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
			ekonomi negara agar mampu bersaing dengan negara-negara lain dan juga Indonesia pada dasarnya telah tergabung dalam ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) dimana dalam hal ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak sehingga Indonesia melanjutkan kerjasamanya dengan China pada tahun-tahun berikutnya setelah 2015.
4.	<p>Skripsi :  <b>Hubungan Bilateral Kebudayaan Indonesia dan Malaysia (Studi Kasus: Interaksi Budaya Sumatera Barat dan Negeri Sembilan)</b></p> <p>Oleh : Sutan Ahmad Riyadh</p>	<p>Metode : Deskriptif</p> <p>Teori/Konsep :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep Diplomasi Kebudayaan</li> <li>- Teori Kepentingan Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan Daerah Sumatera Barat dengan Negeri Sembilan dapat dilihat beberapa aspek yakni aspek kesejarahan dan aspek adat budaya.</li> <li>- Aktivitas dalam interaksi antara kedua daerah yakni kunjungan-kunjungan yang dilakukan antar keluarga raja, yakni yang dilakukan antar keturunan dan keluarga raja Negeri Sembilan Malaysia dengan keturunan dan ahli waris raja</li> </ul>

No.	Nama dan Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
			<p>Pagaruyung di Sumatera Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertukaran misi kebudayaan, hal ini juga menimbulkan adanya beberapa kerjasama antara lain dalam bidang kebudayaan, pendidikan, ekonomi.</li> </ul>
5.	<p>Skripsi :  <b>Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pada Masa Perdana Menteri Kevin Rudd (2007-2013)</b></p> <p>Oleh : Dwi Ana Wiyatiningrum</p>	<p>Metode :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deskriptif</li> </ul> <p>Teori/Konsep :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik</li> <li>- Geografis</li> <li>- Hubungan Internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kevin Rudd membawa perubahan bagi Indonesia dan Australia. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, keamanan dan pertahanan.</li> </ul>
6.	<p>Skripsi :  <b>Dampak Sosial dan Budaya terhadap Perjanjian Strategic Partnership Agreement Indonesia-Tiongkok Pada Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Jawa Timur (PITI JATIM)</b></p> <p>Oleh : Lutfiya AL-Qarani</p>	<p>Metode :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitatif-Deskriptif</li> </ul> <p>Teori/Konsep :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liberalisme</li> <li>- Konsep Kerjasama Bilateral</li> <li>- Konsep Dampak Sosial dan Budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah adanya Perjanjian Kemitraan Strategis atau yang dikenal dengan Startegic Partnership Agreement (SPA) Indonesia-Tiongkok pada tahun 2005, memberikan dampak yang dirasakan oleh PITI JATIM terhadap hubungannya dengan Tiongkok.</li> <li>- Dampak secara Sosial dan juga Budaya yang dirasakan antara kedua negara.</li> </ul>

## 1.5 Teori/Konsep

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini terdapat teori dan konsep yang mendasarinya dan menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan pada topik skripsi yang akan dibahas yakni mengenai “*Dampak Penandatanganan Strategic Partnership Agreement Terhadap Hubungan Indonesia-Tiongkok dalam Studi Kasus PITI JATIM*”. Hal ini yang mendasari penulis untuk menggunakan Liberalisme, Konsep Kerjasama Bilateral dan Konsep Dampak Sosial dan Budaya. Pada kaitannya hal ini maka akan menjadi sebuah acuan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi sehingga nantinya akan terdapat pemahaman lebih mengenai permasalahan yang akan dipecahkan dengan menggunakan alat analisis tersebut.

### 1.5.1 Liberalisme

Liberalisme bersumber dari konsep kebebasan secara umum dimana masuk dalam konsep filosofi politik dan mengenali kondisi dimana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Menurut buku dari pada Moravcsik, Andrew yang berjudul *Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics*, variasi dari Teori Liberal dibagi menjadi tiga, yaitu Ideasional Liberalism, Commercial Liberalism dan Republican Liberalism.<sup>10</sup>

Dalam kaitannya hal ini maka penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis Liberalisme Ideasional, dalam hal ini cenderung lebih terfokus pada kesesuaian dari hal yang disukai masyarakat terhadap aspek-aspek seperti persatuan

---

<sup>10</sup> Yanuar Ikbar, 2014, *Metedologi & Teori Hubungan Internasional*, Bandung : PT. Refika Aditama, hal. 176.

nasional, institusi-institusi politik yang terlegitimasi dan regulasi-regulasi dalam kegiatan sosio-ekonomi. Menurut **John Stuart Mill, Giuseppe Mazzini, dan Woodrow Wilson** memandang bahwa konfigurasi antara nilai-nilai dan identitas dalam negeri adalah sebagai penentu dasar prefensi suatu negara, baik dalam hal kerjasama maupun ketika terjadi konflik antar negara.<sup>11</sup>

Kaum Liberal memandang bahwa pertahanan, integritas teritorial, dan keamanan nasional bukanlah sebuah tujuan akhir, tetapi menjadi sebuah sarana untuk mewujudkan tujuan akhir dari kepentingan nasional yang didasari dari tuntutan oleh kelompok masyarakat. Dalam hal ini maka cita-cita dasar Liberalisme, semangat yang oleh Fukuyama dikatakan untuk menggantikan kepatuhan buta terhadap otoritas dengan pemerintah yang rasional, di mana semua manusia bebas dan sama, tidak harus patuh pada pemimpin, melainkan pada diri sendiri.<sup>12</sup>

Dalam hal ini maka terdapat dua asumsi utama yang mempengaruhi disiplin ini pada masa-masa awal pembentukannya, yakni: *Pertama*, kaum liberal umumnya mengambil pandangan positif tentang sifat manusia. Mereka memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Walau kaum liberal mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal, tetapi mereka juga meyakini bahwa individu-individu memiliki banyak kepentingan, demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan

---

<sup>11</sup> Ibid, hal. 177.

<sup>12</sup> Shaumul Hadi, 2008, *Third Debate dan Kritik Positivisme Ilmu Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Jalasutra, hal. 54.

kooperatif (*harmony of interest*), yang bermanfaat bagi setiap orang. *Kedua*, kaum liberal meyakini kemajuan, yakni kehidupan yang lebih baik, paling tidak bagi mayoritas individu. Manusia memiliki akal pikiran, dan ketika mereka menggunakannya pada masalah-masalah internasional, kerjasama yang lebih besar akan menjadi hasil akhir.<sup>13</sup>

### **1.5.2 Konsep Kerjasama Bilateral**

Hubungan bilateral merupakan suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi diantara dua Negara. Negara-negara di dunia banyak menggunakan kerjasama bilateral antara kedua negara antara lain : perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Hubungan bilateral ini dapat dikatakan juga sebagai bentuk hubungan kerjasama (diplomatis) antara satu negara dengan negara lainnya.

Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain pada dasarnya telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.<sup>14</sup> Dalam hal ini pula maka KJ. Holsti menyatakan bahwa transaksi dan interaksi diantara Negara-negara dalam sistem internasional saat ini bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Timbul berbagai masalah nasional, regional atau global yang memerlukan perhatian dari banyak negara. Khususnya sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau pun membahas masalah dengan akhirnya membuat sebuah perjanjian untuk

---

<sup>13</sup> Ibid, hal. 58.

<sup>14</sup> Kementerian Luar Negeri, *Kerjasama Bilateral*, diakses dalam <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-bilateral.aspx>, (12/4/2017, 14:22 WIB)



menguatkan kedua belah pihak. Proses ini yang dinamakan dengan kolaborasi atau kerjasama.<sup>15</sup>

Kerjasama Bilateral ini pula dapat dilaksanakan oleh Indonesia dengan suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik terhadap Indonesia serta kedua negara tersebut telah menandatangani “Persetujuan” atau “*Agreement*” yang nantinya dapat menjadi tonggak bentuk kerjasama bilateral. Di Indonesia ada beberapa contoh bentuk Kerjasama Bilateral yang telah terjadi antara lain : Indonesia-Brunei Darussalam dalam bidang perdagangan ekspor-impor, kemudian Indonesia-Australia dalam bidang perdagangan dua arah.<sup>16</sup>

Kerjasama Bilateral ini pula menurut Budiono Kusumahamidjojo yakni suatu bentuk kerjasama diantara dua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun yang jauh dari seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan kerjasamapolitik, kebudayaan dan struktur ekonomi.<sup>17</sup>

Dalam hal ini pula maka Kerjasama Bilateral yang dilakukan antara Indonesia-Tiongkok berkaitan erat pada konsep Kerjasama Bilateral, bagaimana melihat dampak yang terjadi Indonesia-Tiongkok terhadap adanya *Strategic Partnership Agreement* (SPA) pada Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Jawa Timur (PITI JATIM).

---

<sup>15</sup> Tazrian Juniarto Saputra, *Kerjasama United State Environmental Protection Agency (US-EPA)-Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Udara & Kesehatan Publik (Studi Kasus Program Breathe Easy Jakarta)*. Journal Ilmu Hubungan Internasional, Vol 1, Nomor 2, 2013, Samarinda: HI FISIP UNMUL Publisher, hal. 122.

<sup>16</sup> Edukasinesia, *7 Contoh Kerjasama Bilateral Indonesia Beserta Penjelasannya*, diakses dalam <http://www.edukasinesia.com/2016/08/7-contoh-kerja-sama-bilateral-indonesia.html?m=1>, (12/4/2017, 14:33 WIB)

<sup>17</sup> Budiono Kusumohamidjojo, 1987, *Hubungan Internasional ; Kerangka Studi Analisis*, Jakarta : Bina Cipta, Hal 95.

### 1.5.3 Konsep Dampak Sosial dan Budaya

Dampak merupakan perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktivitas manusia. Dampak sosial merupakan pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat secara positif maupun bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial.<sup>18</sup>

Kemudian, pada dampak budaya yakni merupakan pengaruh atau akibat dari adanya pergeseran zaman, keadaan, dan teknologi yang bersifat positif dan bersifat negatif.

Dampak Sosial dan Budaya, terdapat positif dan juga negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan antara lain : kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan eratnya integritas yang terjadi di masyarakat baik domestik maupun internasional. Kemudian pada dampak negatif yang dirasakan antara lain : Tergesernya bentuk-bentuk budaya nasional oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional, luntarnya kaidah/norma budaya lama seperti : gotong royong dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini maka berkaitan dengan *People to People relations* dimana antara kedua negara Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan baik dalam kerjasama yang dilakukan, dalam hal ini maka Non-Governmental Organization atau NGO memiliki peranan penting pula dalam hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Indonesia melalui PITI JATIM sebagai NGO yang berhubungan dengan

---

<sup>18</sup> Kementrian Sosial Republik Indonesia, *Pengertian Dampak Sosial*, diakses dalam <http://www.kemsos.go.id/content/dampak-sosial> (18 /9/2017, 8:42 WIB)

adanya perjanjian *Strategic Partnership Agreement* yang dilakukan antara kedua negara.<sup>19</sup>

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif - Deskriptif. Metode ini menunjukkan kualitas atau mutu dari suatu fenomena (keadaan, proses, kejadian/peristiwa) yang dinyatakan dalam bentuk perkataan. Penelitian ini pula mempelajari masalah-masalah masyarakat, serta tata cara yang berlaku didalam masyarakat mengenai hubungan, kegiatan-kegiatan, proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, dari adanya dampak perjanjian SPA Indonesia-Tiongkok.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan data-data baik dari teknik wawancara, atau pun dari sumber-sumber yang lainnya dalam penelitian Dampak Penandatanganan Perjanjian *Strategic Partnership Agreement* terhadap Hubungan Indonesia-Tiongkok dengan Studi Kasus PITI JATIM.

---

<sup>19</sup> Da-Jung Li, Strengthening People-to-People Relations: The Cornerstone of Taiwan-U.S. Ties, diakses dalam <https://www.brookings.edu/research/strengthening-people-to-people-relations-the-cornerstone-of-taiwan-u-s-ties/>. (26/09/2017, 8:56 WIB)

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan studi lapang dimana peneliti memperoleh data dari artikel, jurnal, skripsi terdahulu dan dari website (situs yang terpercaya yang mampu dipertanggung jawabkan) sesuai dengan penelitian yang peneliti angkat.

### **1.6.3 Batasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki batasan materi yang akan digunakan dalam hal ini maka penulis mencoba untuk memberikan batasan penelitian terhadap dampak dari penandatanganan perjanjian *Strategic Partnership Agreement* Terhadap Hubungan Indonesia-Tiongkok pada tahun 2005 dan juga kaitannya dengan dampak yang dirasakan oleh PITIJATIM. Dengan menggunakan Liberalisme, Konsep Kerjasama Bilateral dan Konsep Dampak Sosial dan Budaya..

#### **a) Batasan Waktu**

Dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan batasan waktu yaitu pada tahun 2005 dimana tahun 2005 merupakan tahun dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyo membuat sebuah *Strategic Partnership Agreement* dengan Tiongkok, kerjasama yang dilakukan ini baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Kemudian hingga saat ini, dimana dalam hal ini maka PITI JATIM merupakan aktor non-state yang merasakan dampak dari adanya *Strategic Partnership Agreement* yang dilaksanakan oleh kedua negara.

## **b) Batasan Materi**

Dalam hal ini maka penulis mencoba memberikan batasan materi terhadap penelitian ini berkaitan dengan saat dimulainya *Strategic Partnership Agreement* pada tahun 2005 antara Indonesia dan Tiongkok, kemudian dampak dari adanya perjanjian Kemitraan Strategis tersebut terhadap jalannya aktor non-state PITI JATIM, dimana PITI JATIM pada tahun 2007 mencoba untuk aktif kembali dalam program-programnya..

### **1.6.4 Locus dan Focus Penelitian**

Locus dalam penelitian ini adalah SPA ( *Strategic Partnership Agreement* ) antara Indonesia dan Tiongkok. Kemudian Focus dalam penelitian ini adalah Dampak yang dirasakan oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Jawa Timur (PITI JATIM) dari adanya penandatanganan perjanjian SPA (*Strategic Partnership Agreement*) yang berlaku pada tahun 2005.

## **1.7 Argumen Pokok**

Kerjasama Bilateral antara Indonesia-Tiongkok didasari atas terjadinya *Strategic Partnership Agreement* yang dilakukan pada tahun 2005. Hal ini erat pula kaitannya terhadap dampak yang dirasakan oleh Non-Governmental Organization di Indonesia salah satunya yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Jawa Timur (PITI JATIM).

Penandatanganan perjanjian *Strategic Partnership Agreement* yang dilakukan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan April tahun 2005,

menghasilkan hubungan kerjasama antara kedua negara yaitu Indonesia dan Tiongkok baik dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lainnya hal ini juga merujuk kepada elemen masyarakat antar kedua negara. Terkait pada konsep kerjasama bilateral maka Indonesia-Tiongkok pada PITI JATIM telah melakukan beberapa kerjasama antara dalam bidang sosial dan budaya.

Pada bidang sosial dampak yang dirasakan Indonesia yang diwakili oleh PITI JATIM yakni adanya pertukaran ulama antara PITI JATIM dengan ulama yang ada di Tiongkok tepatnya di Nanjing. Kemudian dari adanya dampak budaya yang dirasakan yakni Masjid Cheng Hoo menjadi *icon* wisata pada turis asing yang berkunjung ke Surabaya, Jawa Timur. Tidak hanya itu melainkan bedug berasal dari Tiongkok, yang kemudian dijadikan budaya oleh islam di Indonesia sendir, ini sebagai wujud akulturasi budaya dimana secara filografis terjadi perpaduan antara etnik Nusantara dengan etnis luar seperti Tiongkok, Timur Tengah dan India.

Kemudian pada Presepektif Liberal yang mengatakan bahwasannya individu-individu memiliki kepentingan yang membawa pada aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif yang bermanfaat bagi setiap orang, kemudian kaum liberal meyakini kemajuan berarti kehidupan yang lebih baik, serta manusia memiliki akal pikiran, dan ketika mereka menggunakannya pada masalah-masalah internasional, kerjasama yang lebih besar akan menjadi hasil akhir. Dalam hal ini erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana adanya Perjanjian *Strategic Partnership Agreement* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia-Tiongkok dan berdampak pada sosial dan budaya terhadap PITI JATIM.

Kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia dan Tiongkok mengantar pada sebuah kerjasama SPA yang mengakibatkan dampak yang dirasakan oleh PITI JATIM.

Melihat hal ini maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak penandatanganan perjanjian *Strategic Partnership Agreement* terlebih dampak yang dirasakan oleh PITI JATIM sendiri. Dalam hal ini maka penulis juga mencoba untuk menggunakan Liberalisme, Konsep Kerjasama Bilateral dan Dampak Sosial dan Budaya. Hal ini nantinya diharapkan mampu untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada melalui konsep yang dimiliki.



## 1.8 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab, sebagai berikut :

**Tabel 1.2 : Struktur Penulisan**

No.	BAB	ISI BAB
1.	<b>Bab I : Pendahuluan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1 Latar Belakang Masalah</li><li>1.2 Rumusan Masalah</li><li>1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian<ul style="list-style-type: none"><li>1.3.1 Tujuan Penelitian</li><li>1.3.2 Manfaat Penelitian<ul style="list-style-type: none"><li>a) Manfaat Praktis</li><li>b) Manfaat Akademis</li></ul></li></ul></li><li>1.4 Penelitian Terdahulu</li><li>1.5 Teori/Konsep<ul style="list-style-type: none"><li>1.5.1 Liberalisme</li><li>1.5.2 Konsep Kerjasama Bilateral</li><li>1.5.3 Dampak Sosial dan Budaya</li></ul></li><li>1.6 Metode Penelitian<ul style="list-style-type: none"><li>1.6.1 Jenis Penelitian</li><li>1.6.2 Teknik Pengumpulan Data</li><li>1.6.3 Batasan Penelitian<ul style="list-style-type: none"><li>a) Batasan Waktu</li><li>b) Batasan Materi</li></ul></li><li>1.6.4 Locus dan Focus Penelitian</li></ul></li><li>1.7 Argumen Pokok</li><li>1.8 Sistematika Penulisan</li></ul>



2.	<b>Bab II :</b> <b>Perjanjian SPA Indonesia-Tiongkok dan Sejarah PITI JATIM</b>	2.1 Sejarah PITI Indonesia  2.1.1 Sejarah PITI Surabaya (Jawa Timur)  2.2 Hubungan PITI JATIM dengan Tiongkok  2.3 Perjanjian SPA Indonesia-Tiongkok  2.3.1 Keuntungan dari Adanya Perjanjian SPA untuk Indonesia  2.3.2 Keuntungan dari Adanya Perjanjian SPA untuk Tiongkok
3.	<b>Bab III :</b> <b>Dampak Adanya Perjanjian SPA Indonesia-Tiongkok terhadap Perkembangan PITI JATIM</b>	3.1 Dampak Secara Sosial dari Penandatanganan SPA Indonesia-Tiongkok  3.2 Dampak Secara Budaya dari Penandatanganan SPA Indonesia-Tiongkok
4.	<b>Bab IV :</b> <b>Penutup</b>	4.1 Kesimpulan  4.2 Saran

